

Perjumpaan Demokrasi, Multikulturalisme dan Inklusifisme Pendidikan di PM Gontor 7 Putera, Konawe Selatan

Syahrul

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari
email: syahrul.stain@gmail.com

Abstrak

Pendidikan adalah investasi jangka panjang sebuah bangsa. Sebelum masa keterpurukan akibat perang dunia, pertama hingga kedua, pendidikan menjadi tonggak kemasyhuran bangsa-bangsa besar. Sejak kejayaan Mesir kuno, peradaban Islam di Irak dan Spanyol, hingga revolusi juli, adalah bentangan kekuatan pendidikan. Gemerlap politik global terkadang mengalihkan perhatian negara kepada persoalan politik, hingga menampilkan parade kekuatan dominatif suatu bangsa atas bangsa lain. Produk-produk dari usaha pendidikan menjadi alat penebar arogansi antar bangsa. Namun, setelah perang dunia kedua, Jepang misalnya, melakukan reposisi nasional dari kecenderungan ekspansif ke pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan. Hasilnya, Jepang melejit sangat cepat hingga saat ini. Artikel ini berupaya menjelaskan bahwa melalui pendidikan, persoalan-persoalan sosial dapat diurai. Gagasan pendidikan pada dasarnya untuk kepentingan kemanusiaan menyeluruh, sehingga tidak hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Demikian juga sekat-sekat geografis, demografis dan politis, melebur ketika berada dalam lembaga pendidikan. Bangsa Indonesia yang pernah dijajah beberapa abad, ketika menghirup udara kemerdekaan, tidak menampilkan dendam kepada negara bekas penjajah. Pendidikanlah yang mengajarkan para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Bahkan Indonesia harus aktif dalam pergaulan antar bangsa, memelopori perdamaian dunia. Para pendiri bangsa kebanyakan berlatar pendidikan khas Indonesia, seperti pesantren. Salah satunya adalah PM Gontor, yang dalam berbagai gerak pendidikannya, menunjukkan kemampuan mempertemukan demokrasi, multikulturalisme, inklusifisme.

**Kata Kunci: Demokrasi, Multikulturalisme, Inklusifisme,
Pesantren**

Encounter of Democracy, Multiculturalism and Inclusiveness of Education at PM Gontor 7 Putera, South Konawe**Abstract**

Education is a long-term investment of a nation. Before the downturn caused by the world war, first to second, education became the cornerstone of the great nations. Since the glory of ancient Egypt, Islamic civilization in Iraq and Spain, until the July revolution, is a stretch of educational power. The glitter of global politics sometimes diverts the country's attention to political issues, to the parade of a nation's dominating power over other nations. The products of the educational endeavor become a means of spreading the arrogance between nations. However, after the second world war, Japan for example, made a national reposition of the expansionary tendency to the development of Human Resources through education. As a result, Japan skyrocketed very quickly to this day. This article seeks to explain that through education, social issues can be broken down. The idea of education is basically for the sake of humanity is comprehensive, so it is not only accessible to certain groups. Likewise geographic barriers, demographics and politics, merge when in an educational institution. The Indonesian nation that had been colonized for centuries, when it breathed freedom of air, did not show a grudge against the former colonial country. It is education that teaches the founders of the nation that freedom is the right of all nations, as opposed to the principles of humanity. Even Indonesia must be active in the inter-nation association, pioneering world peace. The founders of the nation are mostly educational backgrounds typical of Indonesia, such as boarding schools. One of them is PM Gontor, who in various educational movements, demonstrates the ability to bring together democracy, multiculturalism, inclusiveness.

Keywords: Democracy, Multiculturalism, Inslusivess, Pesantren

Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya membelajarkan manusia agar memiliki pengetahuan untuk dapat memecahkan berbagai persoalan hidupnya. Sejarah kebesaran berbagai bangsa di dunia dibangun di atas kepedulian terhadap sumber daya manusia yang cerdas. Keterpurukan Jepang setelah perang dunia kedua, menyadarkan mereka bahwa menyandarkan kebesaran negara pada kekuatan militer bukanlah pilihan tepat. Orientasi baru pun dimulai dengan melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan, penghormatan terhadap guru yang demikian tinggi¹.

Jauh sebelumnya, pada abad keenam belas, orang-orang dari Eropa Barat meninggalkan kampung halamannya, mencari tanah baru yang kemudian dikenal dengan Amerika. Meskipun pada awal kedatangan mereka menggarap bidang pertanian, tetapi tidak mengecilkan pandangan mereka untuk kepentingan jangka panjang, yaitu investasi di bidang pendidikan. Salah satu artefak pendidikan Amerika yang berjaya hingga kini adalah Harvard University dan Yale University².

Demikian pula kejayaan Islam di Baghdad, Afrika, dan Spanyol adalah potret dari kejayaan di bidang pendidikan. Cerita ini tidak hanya menjadi romantisme Islam, tetapi juga kalangan di luar Islam di berbagai belahan dunia³. Berbeda dengan kejayaan Dinasti Islam Ottoman di Turki yang mengandalkan kekuatan militer, yang hingga saat ini masih meninggalkan rasa trauma pada masyarakat Eropa⁴. Hampir sama dengan kemunculan Jengis Khan dari savana

¹ Lihat Prasetyo, Teguh, and Sri Handayani, *Kebangkitan Jepang Pasca Pendudukan Amerika Serikat Tahun 1952-1964*, (Universitas Jember: Digitas Repository, 2017). Lihat juga Erni, Puspitasari, Fujiyanti Dinny, and Roosiani Indun, "Reformasi Pendidikan Dan Kebangkitan Ekonomi Jepang Pasca Perang Dunia Ke II." (In *Prosiding Seminar hasil penelitian semester genap 2014/2015*, vol. 3, no. 2, pp. 115-128. Unsada, 2015).

² Lihat Krisnadi, I. G., *Sejarah Amerika Serikat*, (2012)

³ Nahadi, Muhammad, Farida Sarimaya, and Sri R. Rosdianti. "Hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan alam dalam perspektif sejarah." *ATIKAN* 1, no. 1 (2016).

⁴ Di satu sisi, kejayaan Ottoman terutama pada masa Sulaiman The Great, menjadi kebanggaan masa lalu orang Islam dalam ekspansi, tetapi hasilnya adalah kebangkitan persatuan Eropa, setelah pasukan Ottoman gagal merebut Kota Wina (*Vienna*) pada 1683 M. Masa ini menjadi titik balik kemunduran Ottoman yang

Mongolia, dengan ambisi melakukan penaklukan berbagai bangsa di dunia⁵. Hasilnya dapat dilihat hingga kini, Mongolia tetaplah menjadi negeri yang dominan berpenduduk nomaden⁶.

Cerita dari berbagai belahan dunia di atas melukiskan sebuah *lanscape* peradaban manusia yang dibangun dari dua sudut pandang, eksklusif dan inklusif. Tanpa bermaksud menyalahkan praktik sejarah di masa lalu, kita dapat menyatakan bahwa menggunakan salah satu dari dua sudut pandang di atas, adalah pilihan. Kondisi maupun arus besar yang melingkupi dunia saat itu tentu memengaruhi pemilihan sudut pandang itu. Pengerahan kekuatan militer untuk melebarkan kekuasaan adalah sebuah pilihan dalam membangun kejayaan. Demikian pula memajukan peradaban melalui pendidikan merupakan solusi bagi kemanusiaan. Meskipun demikian, beberapa negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, telah mengalami bahwa semata-mata membangun tradisi perang tidaklah mampu menjamin kelangsungan jangka panjang negeri mereka. Akhirnya mereka beralih memerhatikan dunia pendidikan.

Kerajaan-kerajaan di Nusantara juga menunjukkan praktik yang mengagungkan kekuatan militer, sebagaimana hikayat kebesaran majapahit yang dihiasi penaklukan demi penaklukan. Hasilnya adalah sentimen terhadap "jawa", yang hingga kini belum sepenuhnya hilang dari memori masyarakat Indonesia. Selain pesantren, sebagai jejak pendidikan Indonesia, sangat sulit menemukan warisan pendidikan di jaman pra kolonial.

tidak lagi agresif, tetapi lebih banyak bertahan menangkis serangan dari luar. Wilayah taklukan yang luas, secara perlahan memisahkan diri. (Lihat El-Ustadzi, Hani Hanifah. "Peran Sultan Sulaiman Al-Qanuni Dalam Membangun Kejayaan Kesultanan Turki Utsmani Pada Abad Ke-16." *JURNAL TAMADDUN* 5, no. 1 (2017). Dalam situasi inilah, gerakan Turki Muda di bawah Mustafa Kemal Attaturk mendapatkan momentum di abad ke-19, hingga akhirnya Ottoman jatuh di awal abad ke-20, 1924 M. Sentimen Ottoman ini masih menghiasi memori orang Eropa, hingga diangkat ke Layar Lebar dalam sebuah film berjudul *Taken*. Film ini secara tersirat mengais percik sejarah Ottoman sebagai pelindung komunitas Tropoja yang terkenal kasar dan brutal. Mereka berasal dari Albania Utara, dekat Kosovo. Film ini menggambarkan Tropoja sebagai kelompok mafia bisnis seksual. (lihat Fasya, Kemal. "Lubang Hitam Peradaban." *Kompas* (2014).

⁵ Man, John. *Jenghis Khan: legenda sang penakluk dari Mongolia*. Pustaka Alvabet, 2016.

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mongolia>, diakses 27 Januari 2018

Para tokoh pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) sejak awal menyadari pentingnya membangun bangsa yang cerdas. Sehingga pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan tentang visi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa"⁷. Para pendiri bangsa sangat menyadari kekalahan demi kekalahan dalam perlawanan rakyat nusantara terhadap sekelompok pedagang bersenjata (VOC) disebabkan oleh kecerdasan masyarakat yang sangat rendah. Rakyat nusantara sangat mudah diadu domba, dan sangat sulit bersatu⁸.

Karenanya pendidikan menjadi pilihan strategis dalam membangun kekuatan nasional. Melalui pendidikan semua komponen bangsa dapat secara bersama menggali dan menunjukkan segala kemampuan terbaik. Pendidikan tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi menyangkut kepentingan kemanusiaan menyeluruh.

Signifikansi Kajian

Sejak reformasi 1998 digulirkan, bangsa Indonesia mengalami zaman keterbukaan yang pada masa sebelumnya tidak didapatkan. Kebebasan berkumpul dan berpendapat mendapatkan kembali momentumnya. Ekspresi kebebasan ditampakkan dalam berbagai bentuk, mulai dari verbal hingga gerakan-gerakan kelompok. Ibarat dua sisi mata uang, zaman keterbukaan telah memerdekakan masyarakat Indonesia dari kungkungan rezim. Pada sisi yang lain, kebebasan tanpa batas sedang mengancam tatanan fundamental bangsa. Tidak hanya pada gelanggang politik dan kebudayaan, tetapi juga merambah hingga ke ranah pendidikan.

Pendidikan berbasis masyarakat sebagai wujud demokratisasi di bidang pendidikan, telah menampilkan berbagai rupa praktik pendidikan. Proses "meramaikan" jagad pendidikan oleh masyarakat tentu patut diapresiasi. Akan tetapi kesempatan ini juga memberi angin segar bangkitnya lembaga pendidikan yang mempraktikkan pendidikan eksklusif. Sekolah seperti ini biasanya terapiliasi dengan gerakan-gerakan keagamaan ideologis-politis, ataupun kelompok keagamaan tertutup lainnya. Jika ditelusuri, praktik pendidikan jenis ini bukanlah tradisi yang berakar di Indonesia, melainkan praktik

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Lihat Soedijarto, Candra Gautama, and Bagus Dharmawan. *Landasan dan arah pendidikan nasional kita*. Buku Kompas, 2008.

pendidikan impor. Karenanya, sekolah-sekolah ini memiliki ikatan yang sangat lemah dengan bangsa Indonesia, sehingga simbol-simbol nasional tidak begitu penting bagi mereka.

Berangkat dari realitas di atas, inklusifisme dalam pendidikan menjadi pilihan strategis dalam praktik pendidikan. Bangsa ini beruntung memiliki lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat di masyarakat, yakni pesantren. Sejak awal kehadiran lembaga ini mampu menjawab kebuntuan pendidikan masyarakat Nusantara, terlebih pada jaman kolonial Belanda yang membatasi akses pendidikan hanya pada kaum priayi. Hingga kini pesantren terus berinvestasi dalam menyediakan sumber daya manusia Indonesia. Karenanya artikel ini melakukan kajian pendidikan Inklusif di salah satu cabang Gontor di Puudahoa, Sulawesi Tenggara. Aspek-aspek yang menjadi sorotan adalah: inklusifisme di PM Gontor 7 Riyadhatul Mujahidin, Multikulturalisme di PM Gontor 7 Riyadhatul Mujahidin, dan Demokrasi Ala PM Gontor 7 Riyadhatul Mujahidin.

Pertemuan Demokrasi dengan Inklusifisme

Demokrasi mencakup persoalan kesetaraan, partisipasi, dan keterbukaan dalam persoalan sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada sebuah bangsa⁹. Kesadaran ini paling tidak telah dimulai pada revolusi juli di Perancis, yang mengusung semangat kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*)¹⁰. Meskipun demikian, jauh sebelumnya di sebuah padang pasir, Makkah (Bakkah) awal abad ke-7, Muhammad putra Abdullah, telah menggemakan persoalan kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan¹¹. Nampaknya, baik kalangan sekuler dan religius menemukan kesepahaman dalam konsep demokrasi ini.

Sementara itu, inklusifisme merupakan sikap berbaik sangka bahwa terdapat kemungkinan kebenaran pada orang lain¹². Hal ini

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diakses 21 Januari 2018

¹⁰ Salah catatan tentang revolusi Perancis dapat ditemukan dalam tulisan Sungkar, Lubna. "Peranan Golongan Borjuis pada Revolusi Perancis Tahun 1789." *Citra Lekha* 1 (2012).

¹¹ Lings, Martin. "Muhammad." *His Life Nased on the Earliest Sources, Rochester, Vermont: Inner Traditions International* (1983).

¹² Gufron, Amir. "Inklusifisme Islam di Indonesia." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 11, no. 1 (2014): 1-13.

sejalan dengan prinsip relatifitas internal yang sering disampaikan oleh Cak Nur¹³, yaitu memandang diri memiliki keterbatasan sehingga terbuka peluang untuk bekerjasama dengan pihak lain. Termasuk juga memandang bahwa orang lain berpotensi benar. Wacana ini dapat dikembangkan dalam konteks yang lebih luas, meliputi relasi antar komunitas, antar keyakinan, hingga antar bangsa.

Berangkat dari uraian di atas, nampak bahwa diskursus inklusifisme bertalian, jika tidak merupakan derivasi, dengan demokrasi. Bahkan juga berkaitan erat dengan tema-tema senada, seperti pluralisme dan multikulturalisme.

Pendidikan Inklusif

Berbagai definisi tentang pendidikan mengisyaratkan bahwa pada dasarnya pendidikan itu bersifat inklusif. Seperti terangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara¹⁴. Artinya, dari segi konten, pendidikan berfokus pada pengembangan diri manusia untuk meraih keunggulan. Tidak ada ruang bagi idiom-idiom primordial untuk hadir dalam pendidikan seperti latar belakang etnik, ekonomi, atau lapisan sosial. Dengan kata lain, pendidikan inklusif memberi ruang yang lapang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk terlibat.

Isu inklusifisme dalam pendidikan nasional saat ini lebih dipersempit lagi pada persoalan-persoalan internal peserta didik seperti: tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, tuna grahita, tuna laras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, gangguan motorik, korban

¹³ Majid, Nurcholish. *Islam: doktrin dan peradaban: sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemandirian*. Yayasan Wakaf Paramadina, 2000

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

penyalahgunaan narkoba-obat terlarang-zat adiktif, dan tuna ganda¹⁵. Dapat diduga ada kesimpulan sementara bahwa diskursus inklusifisme pada ranah sosial telah selesai, sehingga inklusifisme pada praktik pendidikan yang mendesak dilakukan. Secara faktual, anak usia sekolah yang mengalami gangguan sebagaimana disebutkan di atas, belum secara massif terakomodir di sekolah-sekolah. Bahkan pada tingkat perguruan tinggi pun masih terbatas akomodasi atas isu inklusifisme.

Meskipun demikian, fakta-fakta mutakhir bangsa kita menunjukkan bahwa persoalan inklusifisme pada ranah sosial belumlah selesai. Insiden Tolikara¹⁶, Pembakaran Gereja di Aceh dan Larangan Masjid di Bitung¹⁷, Hingga bom Gereja di Surabaya¹⁸, maupun pengusiran warga Syi'ah di Sampang, Madura¹⁹, menjadi bukti bahwa secara sosial kita masih mengidap penyakit eksklusifisme dan intoleran.

Multikulturalisme

Meskipun kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah konsensus berbagai kelompok etnik dan agama di Indonesia, akan tetapi tidak serta merta menyebabkan terjadinya asimilasi antar etnik ataupun agama. Hingga di usia bangsa yang telah melewati separuh abad, ketegangan bernuansa etnik dan agama masih menjadi pekerjaan rumah. Perang antar suku di Papua²⁰, terjadi juga di Ambon dan Poso yang disertai sentimen agama²¹. Yang tidak pernah selesai adalah

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa

¹⁶<https://news.detik.com/berita/2971800/soal-insiden-tolikara-menag-larangan-beribadah-melanggar-konstitusi>, diakses 11 Maret 2018

¹⁷ <http://www.madinaonline.id/s5-review/setelah-gereja-dibakar-di-aceh-kini-masjid-dilarang-di-bitung/diakses> 11 Maret 2018

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Surabaya, diakses 5 Mei 2018

¹⁹ <https://nasional.tempo.co/read/377115/pengusiran-paksa-warga-syah-sampang-dikecam>, diakses 11 Maret 2018

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-3914121/5-bulan-perang-suku-di-papua-tak-kunjung-selesai-9-orang-tewas>, diakses 11 April 2018

²¹<https://nasional.tempo.co/read/668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia>, diakses 11 Maret 2018

sentimen pribumi terhadap warga Tionghoa, terutama akhir-akhir ini Indonesia "dibanjiri" tenaga kerja dari Tiongkok²².

Berbagai bentuk penyelesaian konflik berlatar budaya dan agama telah diupayakan berbagai kalangan. Misalnya resolusi konflik yang bersumber dari kearifan lokal masing-masing daerah seperti yang dilakukan Nurdin dan Kasim di Aceh. Penyelidikan Nurdin dan Kasim menunjukkan bahwa Aceh memiliki kearifan lokal yang relevan dalam menangani konflik sosial. Nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh orang Aceh antara lain: tidak mendendam, musyawarah mufakat, ikhlas, damai, tanggung jawab, dan setara di depan hukum²³. Adapula resolusi konflik dengan melibatkan pemimpin komunitas yang berkonflik, seperti yang terjadi pada etnik Samawa dan Etnik Bali di Sumbawa²⁴. Dapat pula melalui pendidikan damai dengan menciptakan forum lintas budaya, etnik, dan agama, seperti yang dilakukan di Yogyakarta²⁵.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan adaptasi dari hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi²⁶. Pendekatan kualitatif-etnografis sebagai salah satu varian dari penelitian kualitatif, merupakan upaya memahami latar suatu situasi sosial, dimana terjadi

²² Sentimen pribumi terhadap warga keturunan Tionghoa telah berlangsung lama di Indonesia. Hingga pada masa Orde Baru ada upaya untuk melakukan asimilasi terhadap warga Tionghoa. Usaha ini belum menunjukkan hasil hingga pecahnya reformasi 1998. (lihat Suryadinata, Leo. "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?." *Antropologi Indonesia* (2014).

²³ Nurdin, Nurdin and Kasim, Fajri M., *Resolusi Konflik Berbasis Adat Di Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe*, Proceedings ARICIS, Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies, No. 1 (2017)

²⁴ Iskandar, Syaifuddin. "Resolusi Konflik Etnik Samawa Dan Etnik Bali Di Sumbawa." *Populasi* 20, no. 1 (2009): 57-72.

²⁵ Machali, Imam, Zainal Arifin, and Ahmad Rodli. "Peace Education sebagai Resolusi Konflik Studi Kasus di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY." *An-Nur* 7, no. 2 (2016): 25-51.

²⁶ Lihat Spradley, James P. *Participant observation*. (Waveland Press, 2016)

interaksi antara tiga aspek: *place*, *actor*, dan *activity*²⁷. Teknik yang digunakan dalam berinteraksi dengan situasi sosial adalah wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan telaah dokumen. Untuk mendapatkan informasi yang luas dan mendalam dibutuhkan informan kunci, sebagai pembuka akses pada berbagai informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan menggunakan model dari spradley yang meliputi: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya²⁸. Keabsahan data diuji melalui proses triangulasi, *member check*, perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan²⁹.

Inklusifisme di PM Gontor VII Riyadhatul Mujahidin

Diskursus tentang inklusifisme dijumpai dalam teologi kristen, terutama para golongan *ekumenis*, yang menganggap bahwa kristus bukan hanya milik kristen tetapi seluruh umat manusia. Demikian pula dalam Islam, pesan inklusif dapat dijumpai dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah: 62, bahwa orang-orang beriman, Yahudi, Nashrani, dan Shabi'in akan mendapatkan pahala dari Tuhan³⁰. Diskursus inklusifisme berkembang keluar wilayah keagamaan, salah satunya pada bidang pendidikan.

Jika diterjemahkan lebih luas, inklusifisme merupakan pandangan yang menyangkut kepentingan bersama atas berbagai persoalan. Cara pandang ini diperhadapkan istilah eksklusifisme, yaitu paham tentang kepentingan sektoral, baik itu agama, budaya, etnik, komunitas, ataupun apiliasi politik³¹. Bangsa Indonesia sejak awal menegaskan komitmen kuat terhadap isu-isu kemanusiaan, sebagai termaktub dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan "kemerdekaan sebagai hak segala bangsa,

²⁷ Lihat Sugiyono, Prof. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta* (2005)

²⁸ Spradley, *op.cit*

²⁹ Lexy, J. Moleong. "Metode penelitian kualitatif." *Bandung: Rosda Karya* (2002)

³⁰ Lihat Zainal, Asliah. "Beragama dalam Keberagaman." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 8, no. 2 (2013): 65-77.

³¹ Inklusivisme adalah satu tipologi yang dikemukakan oleh Alan Race dalam wacana teologi agama-agama, bahwa dalam pandangan kekristenan peluang keselamatan juga ada pada pemeluk agama lain. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Inklusivisme>, diakses 22 januari 2018)

keadilan, kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi".

Pendidikan sebagai jalan pencerdasan sebuah bangsa, sesungguhnya adalah wahana pembumian gagasan inklusif, karena pendidikan menyangkut hajat hidup semua manusia, tanpa dipengaruhi embel-embel sosial. Karenanya di Pondok Modern Gontor 7 Putera memiliki gagasan dasar dari Tegal Sari yaitu "Tanggung Jawab memajukan umat Islam dan mencari ridha Allah". Penyebutan Islam dalam gagasan di atas, tidaklah bermaksud menegaskan eksklusifime, tetapi lebih didasarkan pada fakta sosiologis bahwa rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat jauh tertinggal dalam berbagai aspek, dibandingkan dengan penjajajah, ataupun komunitas pendatang. Sejak awal para tokoh Tegal Sari menyadari bahwa jalan keluar dari berbagai ketertinggalan umat Islam adalah melalui pendidikan.

Pada zaman kolonial, akses pendidikan hanya pada kalangan terbatas, seperti keluarga kolonial, bangsawan pribumi atau priayi, dan pendatang. Kehadiran pesantren menjadi jembatan kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia saat itu, terutama masyarakat di wilayah pedesaan. Gontor adalah salah satu pondok pesantren yang memilih tempat di daerah pedalaman Ponorogo, yaitu Gontor, yang merupakan kampung para penyamun.

Didasari semangat "mencari ridha Allah", pendiri Gontor Lama berjuang merubah citra Gontor sebagai sarang penyamun menjadi tempat belajar ilmu agama Islam. Hasilnya, masyarakat dari berbagai dusun berdatangan untuk menimba ilmu di Dusun Gontor. Dalam perjuangannya, Gontor pernah mengalami masa kemunduran, hingga akhirnya bangkit pada masa Gontor Baru, yang dipimpin oleh Trimurti.

Penamaan "Darussalam" pada pondok Modern Gontor adalah kelanjutan logis dari spirit mencari keridhaan Allah. Bahwa Gontor yang dirintis di sarang penyamun berperan dalam menciptakan kedamaian di masyarakat. Pondok Modern Gontor dan masyarakat sekitarnya adalah gambaran dari sebuah "kampung damai". Semangat ini secara berkelanjutan mengalami internalisasi kepada para santri, hingga menjadi alumni. Kemanapun lulusan PM Gontor pergi, dalam aktifitas apapun, padanya selalu melekat tanggung jawab menciptakan kedamaian.

Dalam rangka menyiapkan generasi yang siap hidup di masyarakat luas, PM Gontor membekali santri kesiapan mental hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tercermin dalam semboyan "Siap Memimpin dan Siap Dipimpin". Berbagai kegiatan pondok yang dilalui santri, tidak hanya menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin, tetapi juga kesiapan untuk dipimpin. Berbeda dengan beberapa sekolah modern saat ini yang sejak awal "membusung dada" sebagai pencetak para pemimpin. Semangat Gontor yang demikian, menyebabkan mereka dapat mengambil posisi yang tepat atas berbagai persoalan di masyarakat, bahkan di tingkat nasional. Peran ini terlihat dari para alumni yang menjadi tokoh nasional seperti Nurcholish Madjid, yang selalu mengingatkan betapa pentingnya memahami "relatifitas internal"³². Sebuah pemahaman tentang keterbatasan diri, sehingga sangat terbuka menerima pandangan dari orang lain.

Multikulturalisme di PM Gontor 7 Riyadhatul Mujahidin

Pada era Gontor baru yang dipimpin oleh Trimurti, PM Gontor memperkenalkan model "pendidikan mendunia". Gagasan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam harus dapat diterapkan pula dalam pendidikan pesantren. Kehadiran pendiri PM Gontor dalam salah satu konferensi Islam dunia mencari pemicu gagasan pendidikan mendunia di atas. Bahwa Islam yang tersebar di berbagai bangsa tidak boleh mengalami keterputusan hubungan satu sama lain. Disebabkan ketersebaran Islam pada berbagai bangsa, maka komunikasi antar bangsa membutuhkan pemahaman budaya antar bangsa pula. Penguasaan bahasa Internasional (Inggris-Arab) yang menjadi keunggulan PM Gontor adalah akibat dari gagasan pendidikan mendunia. Dalam mempelajari bahasa selalu mengikut pemahaman lintas budaya (*cross culture understanding*). Modal ini sangat penting dalam menghadapi pergaulan antar bangsa.

Proses pendidikan di PM Gontor menyiapkan generasi-generasi global. Di samping penguatan kompetensi dalam dua bahasa internasional, pemahaman lintas budaya juga senantiasa dikenalkan pada momentum besar PM Gontor. Pada kegiatan apel tahunan (*khutbatul urs*) misalnya, selalu menyertakan parade kebudayaan dari berbagai anak bangsa. Sangat mudah ditemukan seorang santri PM

³² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban*, op.cit

Gontor yang dapat membawakan beberapa tarian dari beberapa suku di Indonesia.

Para santri pada tingkat tertentu mulai diajarkan sikap-sikap keterbukaan, kesiapan menerima perbedaan, tidak hanya dalam konteks sosial tetapi juga menyangkut pemahaman keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu bahan bacaan santri PM Gontor yaitu "*Bidayatul Mujtahid*", karya Ibnu Rusyd yang membahas persoalan keagamaan dari berbagai mazhab. Buku menyampaikan pesan keterbukaan, belajar dari berbagai sumber, dan menjauhi fanatisme sempit.

Sebelum era Gontor Baru, semangat keterbukaan ini telah menjadi kebiasaan di Tegal Sari. Tercatat bahwa beberapa tokoh dari berbagai latar belakang pernah mondok di Tegal Sari seperti: Paku Buwono II dari keraton Kartasura, Ronggowarsito seorang pujangga, dan Tjokroaminoto seorang tokoh pergerakan nasional. Bahkan pimpinan Pondok Tegal Sari diambil mantu oleh Paku Buwono II.

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa catatan terkait multikulturalisme di PM Gontor 7, sebagai berikut:

Pertama, praktik multikulturalisme di PM Gontor 7 didasarkan pada pengalaman generasi pertama PM Gontor di Tegal Sari, tentang tanggung jawab memajukan umat Islam dan mencari ridha Allah. Meskipun masyarakat Indonesia sangat majemuk, tetapi mayoritas memeluk agama Islam. Sehingga persoalan Indonesia, pada saat yang sama merupakan persoalan umat Islam. Kondisi umat Islam yang tertinggal di berbagai bidang saat itu, menjadi pemantik para pendahulu Gontor untuk mendirikan lembaga pendidikan yang dapat memberi akses pendidikan pada umat Islam. Dalam konteks Gontor, multikulturalisme dapat dimaknai sebagai menyatukan umat Islam dari berbagai latar belakang dalam proses pendidikan pesantren.

Kedua, Gagasan dasar di atas, pada era Gontor Baru yang dipimpin Trimurti, diturunkan melalui model pendidikan yang mendunia. Model ini mengadopsi beberapa model pendidikan yang dilakukan di luar negeri seperti di Al Azhar di Mesir, Syanggit di Mauritania, Alighar di India, dan Santiniketan di India. Adaptasi ini menggambarkan semangat PM Gontor yang sangat terbuka, tidak hanya menerima pendidikan yang dikembangkan oleh Islam, tetapi menerima secara positif praktik yang dikembangkan agama lain seperti santiniketan yang Hindu.

Ketiga, Pendidikan di PM Gontor membekali santri berbagai pengetahuan tentang masyarakat yang beragam, bahkan semesta ini dianggap sebagai guru. Ungkapan Minang "alam takambang jadi guru" sangat pantas untuk menggambarkan hal ini. Fanatisme sempit sejak dini dihindari dalam proses pendidikan Gontor, sebagaimana bunyi salah satu sila dalam panca jiwa, yaitu "jiwa bebas". Keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia akan sulit diwujudkan jika menganut fanatisme sektoral. Sehingga para santri dibekali dengan bacaan-bacaan yang dapat membentuk *mindset* keterbukaan, seperti kitab *bidayatul mujtahid* dari Ibnu Rusyd.

Keempat, sebelum mengenal budaya di luar Indonesia, maka para santri mesti mengenal terlebih dahulu budaya dalam negeri. Belajar tentang keragaman domestik dan merasakan secara seksama hidup dalam keragaman, menjadi modal bagi para santri dalam mengarungi pergaulan dunia yang lebih luas lagi.

Kelima, perbedaan lapisan sosial tidak menjadi penghalang dalam melakukan integrasi. Penyatuan keluarga pesantren dengan keluarga keraton, sebagaimana perkawinan antara pimpinan pondok Tegal Sari dengan anak Paku Buwono II, adalah gambaran tentang proses integrasi dari lapisan sosial yang berbeda. Tradisi ini sesungguhnya adalah derivasi dari ajaran Islam yang tidak mengenal sistem "kasta", dimana suatu kasta dengan kasta yang lain, hidup dalam "kotak"nya masing-masing. Pada titik tertentu, hidup dalam sistem kasta "membolehkan" dominasi suatu kasta atas kasta yang lain.

Multikulturalisme di PM Gontor sejalan dengan semangat Bineka Tunggal Ika yang diperkenalkan Mpu Tantular. Sebuah konsep hidup terbuka, saling menerima, saling mengakui satu sama lain, untuk hidup bersama dalam sebuah negara bangsa³³. Menggunakan cara pandang ini, maka PM Gontor dapat disebut sebagai miniatur nusantara. Santri-santri di PM Gontor datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari berbagai organisasi kemasyarakatan, maupun apiliasi politik. Ketika memasuki gerbang PM Gontor, segala atribut sosial melebur menjadi atribut Gontor.

³³ Winataputra, Udin Saripudin. "Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 14, no. 75 (2008): 1009-1027.

Demokrasi Ala PM Gontor 7 Riyadhatul Mujahidin

Praktik demokrasi diajarkan pada santri dalam pengelolaan kegiatan santri secara mandiri. Lembaga-lembaga santri yang berperan dalam mengeksplorasi minat-bakat santri, sepenuhnya dikelola oleh santri. Pada momentum perayaan hari-hari bersejarah PM Gontor, kemandirian santri sangat nampak, mulai dari ide hingga pementasan. Kondisi ini merangsang kreatifitas santri, sehingga pada setiap momentum selalu melahirkan kejutan-kejutan. Praktik demokrasi di Gontor dapat disebut "dari santri, oleh santri, dan untuk santri".

Meskipun kepemimpinan pesantren, sebagaimana dikenal banyak orang, berpusat pada Kiai, namun kepemimpinan Kiai Gontor dipraktikkan dalam koridor kualifikasi kepemimpinan modern. Misalnya, musyawarah untuk mengambil keputusan, memberi kebebasan bagi santri dalam berkreasi, dan sebagainya. Bahkan lebih mengejutkan bahwa PM Gontor bukanlah milik sekelompok orang, atau keluarga, tetapi telah diserahkan menjadi milik umat.

Berbeda dengan pengelolaan pondok pesantren yang lain, biasanya dikendalikan oleh keluarga. Perjuangan panjang dari Tegal Sari yang bersemangat keumatan, tidak boleh menyimpang menjadi semangat kelompok, tetapi konsisten untuk kepentingan keumatan pula. "Demokrasi keumatan" di PM Gontor benar-benar mewujudkan dalam praktik, bukan demokrasi dalam semboyan.

Penutup

PM Gontor sejak kelahirannya telah memikul "tanggung jawab memajukan umat Islam dan mencari ridha Allah". Indonesia sebagai medan juang PM Gontor, menempatkan umat Islam sebagai mayoritas, tidak hanya di Indonesia bahkan dunia. Akibatnya persoalan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan selalu menyentuh umat Islam. Sehingga lahirlah gagasan di atas. Pendirian lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren juga sangat strategis karena persoalan umat yang disebutkan di atas hanya dapat di atasi melalui pendidikan, menciptakan manusia-manusia cerdas secara paripurna. Di samping itu, pesantren dapat menampung santri dari berbagai lapisan, terutama pada jaman kolonial.

Tanggung jawab memajukan umat Islam dan mencari ridha Allah itu, dalam konteks Indonesia bersinggungan dengan persoalan multikulturalisme masyarakat Islam Indonesia. Walaupun mayoritas, namun umat Islam Indonesia berada dalam berbagai basis budaya

yang berbeda-beda. Akibatnya adalah pentingnya kehadiran lembaga pendidikan inklusif dan demokratis. PM Gontor menunjukkan kemampuan melakukan elaborasi atas keragaman bangsa tersebut.

Penanaman nilai-nilai inklusif, demokrasi, dan multikultur memerlukan ikhtiar yang sistematis dan terorganisir sehingga dapat didiseminasi ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Nilai-nilai tersebut mesti dapat menjelma dalam tindakan nyata seperti pada pembukaan lembaga pendidikan secara berjenjang, dan pelebaran sayap-sayap organisasi. Pendidikan berjenjang dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, dimaksudkan sebagai cara penanaman nilai sejak dini, kemudian secara berkesinambungan dipermantap pada jenjang-jenjang pendidikan berikutnya hingga pendidikan tinggi.

Daftar Pustaka

- El-Ustadzi, Hani Hanifah. "*Peran Sultan Sulaiman Al-Qanuni Dalam Membangun Kejayaan Kesultanan Turki Utsmani Pada Abad Ke-16.*" *JURNAL TAMADDUN* 5, no. 1 (2017)
- Erni, Puspitasari, Fujiyanti Dinny, and Roosiani Indun, *Reformasi Pendidikan Dan Kebangkitan Ekonomi Jepang Pasca Perang Dunia Ke II*, (In *Prosiding Seminar hasil penelitian semester genap 2014/2015*, vol. 3, no. 2, pp. 115-128. Unsada, 2015)
- Fasya, Kemal. "Lubang Hitam Peradaban." *Kompas* (2014)
- Gufron, Amir. "Inklusifisme Islam Di Indonesia." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 11, no. 1 (2014)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diakses 21 Januari 2018
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mongolia>, diakses 27 Januari 2018
- <https://news.detik.com/berita/2971800/soal-insiden-tolikara-menag-larangan-beribadah-melanggar-konstitusi>, diakses 11 Maret 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Surabaya, diakses 5 Mei 2018
- <http://www.madinaonline.id/s5-review/setelah-gereja-dibakar-di-aceh-kini-masjid-dilarang-di-bitung/>diakses 11 Maret 2018
- <https://nasional.tempo.co/read/377115/pengusiran-paksa-warga-syiah-sampang-dikecam>, diakses 11 Maret 2018
- <https://nasional.tempo.co/read/668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia>, diakses 11 Maret 2018

- <https://news.detik.com/berita/d-3914121/5-bulan-perang-suku-di-papua-tak-kunjung-selesai-9-orang-tewas>, diakses 11 April 2018
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Inklusivisme>, diakses 22 Januari 2018
- Iskandar, Syaifuddin. "Resolusi Konflik Etnik Samawa Dan Etnik Bali Di Sumbawa." *Populasi* 20, no. 1 (2009)
- Krisnadi, I. G. "*Sejarah Amerika Serikat*," (Universitas Jember: Digitas Repository, 2012).
- Lexy, J. Moleong. "Metode penelitian kualitatif." *Bandung: Rosda Karya* (2002).
- Lings, Martin. "Muhammad." *His Life Nased on the Earliest Sources, Rochester, Vermont: Inner Traditions International* (1983)
- Majid, Nurcholish. *Islam: doktrin dan peradaban: sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan.* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000)
- Man, John. *Jenghis Khan: legenda sang penakluk dari Mongolia.* (Pustaka Alvabet, 2016)
- Machali, Imam, Zainal Arifin, and Ahmad Rodli. "*Peace Education sebagai Resolusi Konflik Studi Kasus di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY.*" *An-Nur* 7, no. 2 (2016).
- Nurdin, Abidin, And Fajri M. Kasim. "*Resolusi Konflik Berbasis Adat Di Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe.*" *ARICIS PROCEEDINGS* 1 (2017).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa.
- Prasetyo, Teguh, and Sri Handayani, *Kebangkitan Jepang Pasca Pendudukan Amerika Serikat Tahun 1952-1964,* (Universitas Jember: Digitas Repository, 2017)
- Soedijarto, Candra Gautama, and Bagus Dharmawan. *Landasan dan arah pendidikan nasional kita.* (Buku Kompas, 2008).
- Spradley, James P. *Participant observation.* Waveland Press, 2016
- Sugiyono, Prof. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta* (2005)
- Sungkar, Lubna. "Peranan Golongan Borjuis pada Revolusi Perancis Tahun 1789." *Citra Lekha* 1 (2012).

- Suryadinata, Leo. "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?." *Antropologi Indonesia* (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winataputra, Udin Saripudin. "Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 14, no. 75 (2008): 1009-1027.
- Zainal, Asliah, *Beragama dalam Keberagaman*, (Jurnal Al-Izzah LPPM IAIN Kendari, Vol. 8 No. 2 November 2013)